

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika hubungan internasional tidak pernah lepas dari aktor internasional. Bak sebuah panggung pertunjukan, hubungan internasional diwarnai dengan berbagai aktor internasional sebagai pemerannya, tidak terkecuali presiden suatu negara. Pada tahun 2017, dunia dikejutkan oleh sosok Emmanuel Macron, presiden Perancis termuda yang memenangkan pemilihan presiden Perancis di usia 39 tahun. Macron yang berhaluan tengah (*centrist*) meraih suara sebanyak 66 persen di putaran kedua pemilu,¹ mengalahkan Marine Le Pen yang merupakan pemimpin sayap kanan (*far-right*). Perancis, salah satu negara terkuat di dunia yang pernah menjadi hegemon pada abad ke-18 sekaligus negara anggota G7 dan anggota tetap *United Nations Security Council* (UNSC), telah memilih Macron sebagai presiden mereka. Pemikiran serta sikap tindaknya dipastikan memberi corak baru bukan hanya pada urusan dalam negeri Perancis, tetapi juga dinamika hubungan internasional.

Hingga saat ini, perhatian dunia terfokus pada isu terorisme global. Sejak terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, para pemimpin dunia sepakat bahwa terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan internasional yang bersifat lintas

¹ “Macron's French Election Win Reaches 66 Percent: Ministry,” Reuters, May 8, 2017, <https://www.reuters.com/article/us-france-election-count-idUSKBN18401N>.

batas negara (*transboundary*). Pun demikian dengan Macron. Dalam berbagai kesempatan, ia aktif menyampaikan komitmennya untuk melawan terorisme global, antara lain Al-Qaeda dan Daesh (akronim dalam bahasa Arab untuk Negara Islam di Irak dan Suriah). Perancis memang memiliki sejumlah karakteristik unik yang kerap dianggap saling berkaitan dengan fenomena terorisme yang terjadi di negara tersebut, mulai dari fakta bahwa Perancis merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di Eropa, asas *laïcité* atau paham sekularisme yang memisahkan agama dari urusan publik, hingga serangan terorisme yang terjadi berturut-turut di negara ini, seperti Charlie Hebdo *attack* dan Paris *attack* pada tahun 2015, serta kasus Samuel Paty yang terjadi pada akhir tahun 2020.

Komitmen Macron dalam melawan terorisme global ditunjukkan dengan kebijakan luar negeri Perancis yang aktif melakukan operasi pemberantasan terorisme (*counterterrorism*) di berbagai negara, termasuk Irak, Libya, Mali, Suriah, dan wilayah Sahel.² Macron juga giat merangkul pemimpin negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk bersama-sama memperkuat upaya perlawanan terhadap terorisme global, misalnya melalui pidato yang disampaikannya di forum internasional *North Atlantic Treaty Organization (NATO) Summit* dan *United Nations General Assembly* beberapa tahun belakangan ini. Dapat dikatakan bahwa Macron dan kebijakan luar negeri Perancis yang dibuatnya selalu memprioritaskan isu keamanan dan militer. Hal ini mengingatkan kita pada perkataan presiden pertama Republik Kelima (*Fifth Republic*) Perancis, Charles de Gaulle, yaitu

² U.S. Department of State, *Country Reports on Terrorism 2019: France* (Washington, DC: U.S. Department of State, 2020), <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/france/>.

“*France had been created with the sword*”, sebab sejarah Perancis memang mengalami banyak pertempuran militer, baik secara internal maupun eksternal.³

Pada dasarnya, corak kebijakan luar negeri Perancis dari masa ke masa sejatinya selalu menyoroti persoalan keamanan internasional. Akan tetapi, praktik dan strategi kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk Perancis, sangat ditentukan oleh siapa kepala negara yang sedang menjabat atau individu pembuat keputusan, seperti yang dikemukakan oleh Goldstein dan Pevehouse berikut ini:

*Foreign policies are the strategies governments use to guide their actions in the international arena. Foreign policy outcomes result from multiple forces at various levels of analysis. The outcomes depend on individual decision makers, on the type of society and government they are working within, and on the international and global context of their actions. Individual decision makers not only have differing values and beliefs, but also have unique personalities—their personal experiences, intellectual capabilities, and personal styles of making decisions.*⁴

Kebijakan luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah untuk memandu aksi mereka di arena internasional. Kebijakan luar negeri dihasilkan dari berbagai kekuatan pada level analisis yang beragam. Hasil itu bergantung pada individu pembuat keputusan, tipe masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama dengannya, dan konteks internasional dan global dari aksi mereka. Individu pembuat keputusan tidak hanya memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda, tetapi juga karakter yang unik—pengalaman personal, kapabilitas intelektual, dan gaya personal dalam membuat keputusan.

Selain faktor domestik dan global, individu yang menjadi presiden Perancis juga merupakan faktor dominan yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Pemikiran dan karakter Macron tentu berbeda dengan

³ Henrik Larsen, *Foreign Policy and Discourse Analysis: France, Britain and Europe* (London: Routledge, 2014), 115.

⁴ Joshua S. Goldstein and Jon C. Pevehouse, *International Relations* (New York: Pearson/Longman, 2008), 146-147.

pendahulunya, misal kedua pendahulunya, François Hollande dan Nicolas Sarkozy. Presiden Sarkozy (2007-2012) berasal dari partai sayap kanan dan kerap disebut sebagai “*bling bling president*” karena gaya hidupnya yang mewah dan kedekatannya dengan para elit bisnis (*rich people’s president*).⁵ Ia adalah pemimpin yang cenderung pragmatis, ditandai dengan keputusannya untuk bergabung kembali ke dalam keanggotaan NATO setelah empat dekade tidak menjadi bagian dari aliansi tersebut. Hal ini mencerminkan “*Atlanticism*” Perancis di bawah Sarkozy, yaitu persekutuan (*alignment*) dengan AS yang merobek citra Perancis yang independen (*French exception*) di mata dunia dan kawasan, yang telah dibangun sejak masa pemerintahan de Gaulle, serta menyurutkan posisi Perancis yang sebelumnya selalu menjadi tameng bagi Eropa ketika hendak menentang kebijakan AS.⁶ Meskipun Sarkozy menolak label “*Atlanticist*” atas dirinya, keputusannya kerap memperlihatkan sikap yang *pro-America*, seperti keramahannya pada Israel dan sikap kerasnya pada Iran,⁷ ataupun kebijakan keamanan internasional Sarkozy yang mengutamakan kawasan Timur Tengah dibandingkan Afrika, di mana hal ini sejalan dengan kepentingan Washington.

⁵ Eddy Fougier, “What Is Sarkozysm? The Sarkozy Revolution of the French Right-Wing,” *L’Europe en Formation* 365, no. 3 (2012): 217, <https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2012-3-page-217.htm>.

⁶ Frédéric Bozo, “France and NATO under Sarkozy: End of the French Exception?” (working paper, Fondation pour l’innovation politique, 2008), 10, http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/pdf/documents/DT_Alliance_atlantique_la_fin_de_lexception_francaise_ENG.pdf.

⁷ Tony Karon, “How France’s Presidential Runoff Could Shape Iran Diplomacy,” *Time*, April 24, 2012, <https://world.time.com/2012/04/24/how-frances-presidential-runoff-could-shape-iran-diplomacy/>.

Sementara itu, Presiden Hollande (2012-2017) berasal dari partai sosialis dan merupakan presiden yang dikenal dengan sebutan “*Mr. Normal*” atau “*Mr. Kind*” karena pembawaannya yang sederhana, begitu berbeda dengan penampilan Sarkozy. Namun, kebijakan luar negeri Perancis di bawah kepemimpinannya dalam banyak hal kerap mengikuti kebijakan Sarkozy, seperti ketegasannya terkait intervensi ke Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah ancaman Perancis untuk menyerang Suriah saat terjadi krisis senjata kimia pada tahun 2013. Keberaniannya untuk menggunakan kekuatan militer berdampak mitra-mitra Perancis. AS kembali memperhitungkan Perancis sebagai mitra keamanan yang sebanding dengan Inggris. Para pemimpin Afrika bergantung pada Perancis untuk memberantas teroris Islam di Sahel. Negara Arab di Teluk Persia mengapresiasi keberaniannya dalam melawan Suriah.⁸ Meskipun demikian, tingkat kepuasan masyarakat Perancis terhadap Hollande sangat rendah karena kegagalannya mengatasi masalah pengangguran dan pemulihan ekonomi, sehingga ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi pada pemilu 2017.

Macron tentu mempunyai pemikirannya tersendiri yang unik mengenai keamanan internasional, yang dibentuk dari latar belakang pribadinya dan penyesuaian dengan konteks zaman. Di samping itu, setiap presiden Perancis memiliki kekuasaan yang luar biasa dalam membentuk kebijakan luar negeri karena adanya hak prerogatif. Konstitusi 1958 yang dibuat oleh de Gaulle menjadikan

⁸ Richard Gowan, “Already Forgotten in France, Hollande Will Be Missed in the Global Arena,” *World Politics Review*, April 17, 2017, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/21858/already-forgotten-in-france-hollande-will-be-missed-in-the-global-arena>.

presiden panglima militer tertinggi (*commander-in-chief of the military*) dan memberikannya hak untuk memilih duta besar tanpa persetujuan dari parlemen, sehingga presiden yang partai pengusungnya tidak mengontrol Parlemen Perancis pun tetap dapat dengan leluasa menentukan kebijakan luar negeri Perancis.⁹ Adapun Macron dengan partai *La République en Marche* (LREM) dan koalisinya berhasil memenangkan kursi mayoritas di parlemen.¹⁰ Maka dari itu, Macron merupakan aktor kunci yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Perancis, termasuk dalam memerangi terorisme global. Keputusannya berdampak pada dinamika terorisme dan keamanan internasional, baik di kawasan Eropa, Afrika, maupun dunia, apalagi bila ia kembali maju dan terpilih dalam pemilu presiden 2022. Dengan demikian, penting untuk mengkaji dampak pemikiran Macron terhadap kebijakan luar negeri Perancis dalam memerangi terorisme global.

1.2 Rumusan Masalah

Terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis pada tahun 2017 mengubah kebijakan luar negeri Perancis dalam memerangi terorisme global yang telah menjadi ancaman bagi keamanan domestik Perancis maupun dunia. Berbagai faktor turut memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut, baik di

⁹ Simond de Galbert, "The Hollande Doctrine: Your Guide to Today's French Foreign and Security Policy," CSIS, September 8, 2015, <https://www.csis.org/analysis/hollande-doctrine-your-guide-today%E2%80%99s-french-foreign-and-security-policy>.

¹⁰ "As It Happened: Macron's Centrist Party Wins Absolute Majority in French Legislative Elections," France 24, June 18, 2017, <https://www.france24.com/en/20170618-live-liveblog-france-politics-legislative-elections-parliament-round-2>.

level negara maupun internasional. Namun, salah satu faktor terpenting yang perlu diteliti adalah individu pembuat kebijakan itu sendiri, yaitu Emmanuel Macron. Oleh sebab itu, penulis hendak meninjau lebih jauh mengenai pemikiran Macron terhadap keamanan internasional dalam hubungan internasional, kepentingannya dalam memerangi terorisme global, serta dampak pemikiran dan kepentingan tersebut terhadap kebijakan luar negeri Perancis. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pemikiran Emmanuel Macron tentang keamanan internasional dalam hubungan internasional?
- Apa kepentingan Emmanuel Macron dalam memerangi terorisme global?
- Bagaimana pemikiran dan kepentingan Emmanuel Macron berdampak terhadap kebijakan luar negeri Perancis dalam memerangi terorisme global?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai “Dampak Pemikiran Emmanuel Macron terhadap Kebijakan Luar Negeri Perancis dalam Memerangi Terorisme Global” adalah untuk memahami pemikiran Emmanuel Macron terhadap keamanan internasional dalam hubungan internasional, yang menyangkut gagasan, latar belakang sosial politik, serta aspek psikologisnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kepentingan Emmanuel Macron dalam memerangi terorisme global, yang mencakup agenda dan motivasi pribadinya yang turut

memengaruhi proses pengambilan keputusan. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak pemikiran dan kepentingan Emmanuel Macron terhadap arah dan strategi kebijakan luar negeri Perancis dalam memerangi terorisme global.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan contoh yang relevan dari pengaplikasian level analisis individu sebagai perangkat dalam menjelaskan suatu fenomena hubungan internasional yang riil, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai signifikansi agen atau aktor dalam memengaruhi dinamika hubungan internasional, serta menambah wawasan dan inspirasi mengenai kepemimpinan (*leadership*) seorang pemimpin muda dunia.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Bab I memaparkan penjelasan awal dari penelitian ini. Bab I terdiri atas latar belakang pemilihan topik yang memberikan gambaran umum topik dan urgensi penelitian dampak pemikiran aktor individu terhadap kebijakan luar negeri, rumusan masalah yang berfokus pada objek dan pertanyaan penelitian yang mampu menuntun arah pembahasan mengenai pemikiran dan kebijakan luar negeri secara efektif dan sistematis, serta tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi tentang kerangka berpikir penelitian dan terbagi menjadi dua subbab, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka mengemukakan intisari dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Macron, kebijakan luar negeri Perancis, dan terorisme di Perancis guna mengetahui sejauh mana diskusi mengenai topik ini tengah berlangsung. Selanjutnya, landasan teori

berisi tentang teori dan konsep penting dalam HI yang digunakan sebagai teropong yang tepat untuk melihat, menjelaskan, serta menjawab masalah penelitian yang berhubungan dengan proses bagaimana pemikiran individu berdampak terhadap kebijakan luar negeri.

Bab III adalah metode penelitian. Proses penelitian ini dijelaskan secara rinci mulai dari pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian, proses pengumpulan data, proses analisis data, hingga cara penyajian analisis yang secara umum dipakai sebagai pedoman untuk memperoleh dan mengolah data maupun informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, serta menganalisis data dan informasi tersebut dengan argumentasi penulis yang terstruktur dan akademis, khususnya dalam menganalisis pemikiran Macron dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Perancis yang sulit untuk diidentifikasi oleh Indra.

Lalu, Bab IV adalah analisis yang merupakan puncak dari penelitian. Analisis berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang dijelaskan melalui pembahasan yang mendalam mengenai data, teori, dan konsep yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Seluruh informasi penting akan dikupas dengan seksama dan berpedoman pada teori dan konsep HI yang dipilih pada Bab III dalam menjelaskan aplikasi dari teori dan konsep HI tersebut dengan fenomena yang sungguh terjadi, yakni berdampaknya pemikiran Macron terhadap kebijakan luar negeri Perancis terkait terorisme.

Terakhir, kesimpulan dan saran akan dituangkan dalam Bab V. Bagian kesimpulan mencakup ringkasan dari analisis yang telah dilakukan. Adapun bagian saran yaitu evaluasi terhadap penelitian ini dan rekomendasi penulis untuk langkah

penelitian selanjutnya dalam melengkapi dan menyempurnakan pembahasan mengenai topik penelitian.

